

LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

TAHUN 2026

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan



BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan Tahun 2026. FKP ini merupakan bagian dari komitmen BRMP Kalimantan Selatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi BRMP Kalimantan Selatan, seiring dengan perubahan nomenklatur dan peningkatan status kelembagaan dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (Eselon III) menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (Eselon II). Dengan status kelembagaan yang baru, BRMP Kalimantan Selatan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik secara mandiri sebagai bentuk penguatan tata kelola pelayanan publik yang lebih akuntabel.

Kegiatan FKP dilaksanakan sebagai wadah dialog antara penyelenggara layanan dengan masyarakat, mitra strategis, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi perangkat daerah untuk menghimpun beragam masukan dan pandangan konstruktif mengenai rencana penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) di lingkungan BRMP Kalimantan Selatan. Melalui proses ini, diharapkan standar yang ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pengguna layanan dan mendukung program modernisasi pertanian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan FKP, serta sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pelayanan publik pada tahun berjalan dan tahun mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai jalannya kegiatan, hasil diskusi, masukan stakeholders, dan rencana tindak lanjut BRMP Kalimantan Selatan dalam meningkatkan mutu layanan.

Banjarbaru, 4 Agustus 2026

Penyusun,

Tim PPID BRMP Kalsel

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Pelaksanaan FKP.....	1
C. Ruang Lingkup.....	2
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP	5
A. Sumber Input dan Tema FKP	5
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
C. Penyelenggara dan Peserta FKP	6
D. Metode Pelaksanaan FKP.....	6
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	7
A. Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan	7
B. Materi dan Narasumber.....	8
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Analisis	9
E. Kesepakatan Penyusunan Standar Pelayanan	10
F. Rencana Aksi.....	11
BAB IV. PENUTUP	13
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	14
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR.....	16
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	18
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	22
LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA	23

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.

Pada tahun 2026, seiring dengan perubahan nomenklatur dan peningkatan status kelembagaan menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan yang merupakan unit kerja Eselon II, penyelenggaraan FKP dilaksanakan secara mandiri oleh BRMP Kalimantan Selatan. Hal ini menjadikan FKP semakin penting untuk diselenggarakan sebagai wujud tanggung jawab kelembagaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BRMP Kalimantan Selatan.

B. Tujuan Pelaksanaan FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mengumpulkan pendapat, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP) BRMP Kalimantan Selatan agar lebih relevan, adaptif, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan.
2. Meningkatkan literasi publik mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait prinsip-prinsip pelayanan, alur prosedur, serta hak dan kewajiban pengguna, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik dan partisipasi aktif dalam proses perbaikan layanan.
3. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan mitra strategis dalam proses perumusan kebijakan layanan, sebagai implementasi prinsip partisipatif dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BRMP Kalimantan Selatan dengan stakeholder lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, kelompok tani, dan pelaku usaha pertanian untuk mendukung perbaikan layanan berbasis modernisasi pertanian.
5. Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan layanan publik yang dihadapi pengguna, sehingga BRMP dapat merumuskan solusi inovatif yang tepat sasaran dalam peningkatan kualitas pelayanan.
6. Mengakomodasi aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pengembangan layanan publik berbasis teknologi, digitalisasi, serta peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan.
7. Membentuk komitmen bersama antara BRMP dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan publik yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan mendukung transformasi modernisasi pertanian.
8. Menghasilkan rekomendasi kebijakan dan perbaikan layanan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan, penyempurnaan, serta implementasi Standar Pelayanan Publik (SPP) BRMP Kalimantan Selatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penyusunan, penyempurnaan, dan penguatan Standar Pelayanan Publik (SPP) serta peningkatan kualitas layanan berbasis modernisasi pertanian. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup:

1. Pembahasan Komponen Standar Pelayanan Publik (SPP)
Meliputi penelaahan terhadap seluruh komponen SPP seperti persyaratan, prosedur, biaya, waktu penyelesaian, produk layanan, kompetensi pelaksana, sarana prasarana, jaminan mutu layanan, dan mekanisme penanganan pengaduan.
2. Sosialisasi Prinsip dan Prosedur Pelayanan Publik
Meningkatkan pemahaman peserta FKP mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta hak dan kewajiban pengguna layanan. Sosialisasi ini juga mencakup alur layanan serta kebijakan pelayanan publik BRMP Kalimantan Selatan.
3. Penjaringan Masukan dari Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Menghimpun saran, kebutuhan, isu, dan aspirasi terkait kualitas layanan, kemudahan akses, digitalisasi, inovasi layanan, serta dukungan terhadap modernisasi pertanian di wilayah Kalimantan Selatan.
4. Pembahasan Kebutuhan Modernisasi Layanan
Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, termasuk integrasi layanan berbasis web, data terbuka, serta penggunaan perangkat modern dalam mendukung layanan teknis pertanian.
5. Identifikasi Tantangan Pelayanan Publik
Menganalisis kendala yang dihadapi penyelenggara maupun pengguna layanan, baik dari sisi regulasi, SDM, infrastruktur, teknologi, maupun kapasitas masyarakat.
6. Penguatan Kemitraan Strategis
Mendorong kolaborasi antara BRMP dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, kelompok tani, lembaga riset, serta mitra strategis lainnya untuk mendukung inovasi dan penguatan standar layanan.
7. Perumusan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Menghasilkan rekomendasi pembaruan SPP, peningkatan inovasi layanan, peningkatan transparansi, serta penguatan komitmen BRMP dalam pembangunan Zona Integritas dan modernisasi pertanian.

Sebagai bagian dari pembahasan dalam FKP, ruang lingkup pelayanan publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan mencakup:

1. Layanan Utama
 - a. Layanan Pendampingan, Pengujian, Penerapan, dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, meliputi: konsultasi/narasumber; bimbingan teknis; kunjungan agroedukasi; perpustakaan; magang/MBKM; serta informasi dan dokumentasi.
 - b. Layanan Penilaian Kesesuaian, yaitu Laboratorium Pengujian Mutu Benih

- c. Layanan Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi
- 2. Layanan Pendukung
 - a. Praktik Kerja Lapang (PKL)
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana

BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP

A. Sumber Input dan Tema FKP

Sumber input tersebut menjadi dasar dalam diskusi FKP untuk menghasilkan rekomendasi yang faktual, relevan, dan dapat diterapkan. Pelaksanaan FKP memanfaatkan berbagai sumber input yang diperoleh dari:

1. Dokumen Kebijakan Internal BRMP Kalimantan Selatan, meliputi rancangan Standar Pelayanan Publik (SPP), standar operasional prosedur (SOP), serta informasi layanan yang terkait dengan layanan utama dan layanan pendukung BRMP.
2. Peraturan Perundang-Undangan, terutama Undang-Undang Pelayanan Publik, kebijakan Reformasi Birokrasi, dan regulasi terkait penyelenggaraan FKP dan standar pelayanan instansi pemerintah.
3. Data dan Informasi Pelayanan Publik, termasuk data permohonan layanan, statistik pengaduan, tingkat kepuasan pengguna, hasil survei kepuasan masyarakat, dan evaluasi internal layanan tahun sebelumnya.
4. Masukan dari Pemangku Kepentingan, seperti masyarakat pengguna layanan, kelompok tani, akademisi, pelaku usaha, dinas/instansi terkait, lembaga riset, perguruan tinggi, serta mitra BRMP Kalimantan Selatan.
5. Observasi dan Monitoring Pelaksanaan Layanan, yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada unit layanan BRMP, baik layanan teknis maupun layanan administratif.
6. Pengalaman dan Praktik Baik (*best practices*) yang diterapkan pada unit pelayanan publik lain sebagai bahan perbandingan dan inspirasi dalam penyempurnaan SPP.

Forum Konsultasi Publik (FKP) BRMP Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang dilaksanakan mengusung tema: “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Cepat, Mudah, dan Profesional.”

Tema ini dipilih sebagai komitmen BRMP Kalimantan Selatan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang adaptif, responsif, serta mendukung modernisasi pertanian. Melalui FKP ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan pandangan, masukan, serta rekomendasi perbaikan terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP), sehingga mutu pelayanan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Agustus 2026 pukul 08.30 WITA sampai selesai, bertempat di Gedung Pertemuan BBPMP Kalimantan Selatan, Jalan Panglima Batur Barat Nomor 4, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

C. Penyelenggara dan Peserta FKP

1. Penyelenggara

Kegiatan FKP ini diselenggarakan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan.

2. Peserta FKP

Peserta FKP berjumlah 40 undangan dari berbagai unsur dan hadir sebanyak 50 orang, yang terdiri dari:

- a. Penyelenggara layanan, unit yang menyelenggarakan layanan publik.
- b. Pengguna layanan, masyarakat yang menggunakan layanan pada unit terkait.
- c. Stakeholder pelayanan publik, yaitu pihak yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada unit penyelenggara, meliputi Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga, Dinas/Lembaga tingkat Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Dinas/Lembaga tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
- d. Ahli/praktisi, yaitu individu atau organisasi yang merepresentasikan keahlian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan, termasuk perguruan tinggi dan lembaga pendidikan.
- e. Organisasi Masyarakat Sipil, yaitu organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu berkaitan dengan layanan yang diberikan, termasuk kelompok tani dan petani penangkar benih padi.

D. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara luring (tatap muka) yang memungkinkan terjadinya diskusi interaktif antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan. Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, penayangan profil BRMP Kalimantan Selatan, launching aplikasi *julak.id* sebagai inovasi digitalisasi layanan, paparan layanan BRMP, penyampaian materi dari narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, penyampaian maklumat pelayanan, penandatanganan berita acara kesepakatan, serta pemberian penghargaan (stakeholder award) kepada mitra.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) BRMP Kalimantan Selatan telah menghasilkan sejumlah masukan, pandangan, dan rekomendasi dari para peserta yang terdiri dari masyarakat pengguna layanan, kelompok tani, akademisi, pelaku usaha, instansi pemerintah, serta mitra strategis lainnya. Masukan tersebut menjadi dasar bagi penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan BRMP. Berikut adalah rangkuman hasil pelaksanaan FKP.

A. Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala BBPMP Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc., yang menyampaikan bahwa FKP dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan dan menjelaskan berbagai layanan yang tersedia di BBPMP Kalimantan Selatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus menjadi wadah untuk memperoleh saran, masukan, serta evaluasi dari Ombudsman dan Komisi Informasi sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran video launching JULAK.id sebagai inovasi digitalisasi sarana pelayanan publik. Kepala Bagian Tata Usaha, Muhammad Syarif, menjelaskan mengenai JULAK.id dan harapan agar inovasi tersebut mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan efektif.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. H. Syamsir Rahman, MS., yang menyampaikan apresiasi kepada BBPMP Kalimantan Selatan sebagai perwakilan Kementerian Pertanian di Kalimantan Selatan atas berbagai dukungan bagi pembangunan pertanian di daerah. Beliau juga menyampaikan capaian pembangunan pertanian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dan 2026, mengapresiasi inovasi JULAK.id, serta menekankan pentingnya pemutakhiran luas baku lahan sawah mengingat masih banyaknya lahan sawah yang mengalami alih fungsi, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh dua narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, penyampaian Maklumat Pelayanan Publik oleh Ibu Dr. Shinta Anggreany, penandatanganan berita acara kesepakatan, serta pemberian penghargaan kepada stakeholder.

B. Materi dan Narasumber

1. Peran PPID dan Komisi Informasi dalam Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel

Narasumber: Drs. Ah. Rijani, M.AP. (Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan).

Disampaikan bahwa seluruh instansi yang menggunakan dana APBN maupun APBD wajib memiliki standar pelayanan publik, termasuk keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Beberapa tugas dan kewajiban PPID antara lain: menyusun Daftar Informasi Publik (DIP); menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK); menyediakan dan memberikan informasi publik termasuk informasi layanan dan SOP; menyampaikan informasi serta-merta; mengelola informasi yang dikecualikan termasuk data pribadi; menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi seperti website instansi; serta menyusun SOP pelayanan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

2. Pengawasan Ombudsman terhadap Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan

Narasumber: Rujalinor (Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan).

Disampaikan bahwa seluruh instansi publik yang menyelenggarakan pelayanan publik harus mendapatkan pengawasan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari maladministrasi. Beberapa bentuk maladministrasi antara lain perilaku melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, penundaan yang berlarut, diskriminasi, dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023. Kualitas pengelolaan pengaduan ditentukan oleh komitmen pimpinan; mekanisme pengelolaan pengaduan; landasan hukum; monitoring dan evaluasi secara rutin; penerapan reward and punishment; kompetensi sumber daya manusia; sarana pengelolaan pengaduan; serta sosialisasi/internalisasi mekanisme pengaduan.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan diskusi, tanya jawab, dan masukan tertulis selama FKP, diperoleh beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik BRMP Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Informasi Layanan pada Aplikasi JULAK.id Belum Lengkap

- Informasi publik pada aplikasi JULAK.id belum seluruhnya memuat persyaratan layanan, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif layanan, serta alur/prosedur pelayanan.
 - Informasi mengenai stok/ketersediaan benih pada layanan perbenihan belum tersedia pada aplikasi.
2. Kejelasan Komponen Biaya/Tarif Layanan Perbenihan
 - Sebagian layanan, khususnya layanan perbenihan komoditas tertentu, belum memiliki rincian biaya/tarif yang jelas.
 - Diperlukan penambahan dasar hukum/peraturan terkait tarif layanan laboratorium dan benih sumber.
 3. Mekanisme Penanganan Pengaduan Perlu Diperjelas
 - Alur mekanisme pengaduan belum mencantumkan jangka waktu pada setiap tahapan, baik pada tahap kelengkapan berkas maupun penyelesaian pengaduan.
 - Belum jelasnya bentuk kompensasi yang diberikan kepada masyarakat apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pelayanan.
 4. Integrasi dan Kelengkapan Kanal Informasi Layanan
 - Diperlukan penguatan integrasi aplikasi JULAK.id dengan website resmi BBPMP Kalimantan Selatan agar pengguna tidak perlu mengakses dua platform yang berbeda.
 - Informasi pendukung sektor pertanian, seperti informasi cuaca dan iklim, belum tersedia dalam kanal layanan.

D. Analisis

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dilakukan analisis untuk menemukan akar permasalahan serta potensi perbaikan layanan yang dapat diambil oleh BRMP Kalimantan Selatan.

1. Kelengkapan Informasi Layanan sebagai Kunci Transparansi

Ketersediaan informasi layanan yang lengkap meliputi persyaratan, jangka waktu, biaya/tarif, dan alur pelayanan pada kanal digital merupakan syarat utama pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Kelengkapan informasi pada JULAK.id menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat.
2. Digitalisasi Terintegrasi sebagai Solusi Modernisasi Layanan

Pemanfaatan teknologi digital melalui JULAK.id yang terintegrasi dengan website resmi menjadi kunci peningkatan kualitas layanan. Integrasi platform, penyediaan informasi stok benih, serta penambahan informasi cuaca dan iklim akan memperluas manfaat layanan bagi masyarakat dan sektor pertanian.

3. Kepastian Biaya dan Dasar Hukum Tarif Layanan

Rincian biaya/tarif yang jelas beserta dasar hukumnya, khususnya untuk layanan perbenihan dan laboratorium, diperlukan agar pengguna memperoleh kepastian layanan dan penyelenggara memiliki landasan yang kuat dalam pemungutan tarif.

4. Sistem Pengaduan yang Transparan Meningkatkan Kepercayaan Publik

Penguatan mekanisme pengaduan dengan mencantumkan jangka waktu pada setiap tahapan serta kejelasan bentuk kompensasi akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BRMP.

E. Kesepakatan Penyusunan Standar Pelayanan

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama, disepakati hasil penelaahan terhadap komponen Standar Pelayanan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan, dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1	Persyaratan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tidak ada masukan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap jangka waktu pelayanan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
4	Biaya/tarif	Sebagian masih belum ada rincian biaya/tarif untuk layanan perbenihan komoditas tertentu	Merinci harga bibit/benih yang diperjualbelikan
5	Produk Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap produk pelayanan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Alur mekanisme pengaduan belum mencantumkan jangka waktu pada setiap tahapan (kelengkapan berkas dan penyelesaian) proses penanganan pengaduan	Menambahkan jangka waktu pada tahapan mekanisme pengaduan
7	Dasar Hukum	Perlu menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan	Menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan laboratorium dan benih sumber
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tidak ada masukan terhadap sarana dan prasarana	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
9	Kompetensi Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap kompetensi pelaksana	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
10	Pengawasan Internal	Tidak ada masukan terhadap pengawasan internal	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
11	Jumlah Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap jumlah pelaksana	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
12	Jaminan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap jaminan pelayanan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap evaluasi kinerja pelaksana	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan standar pelayanan yang mengikutsertakan masyarakat serta pihak terkait dalam setiap proses sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

F. Rencana Aksi

Sebagai tindak lanjut dari hasil FKP, BRMP Kalimantan Selatan merumuskan beberapa langkah aksi konkret yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, kemudahan, dan profesionalisme layanan publik:

1. Melengkapi Informasi Layanan pada Aplikasi JULAK.id
 - Menambahkan informasi persyaratan, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, serta alur/prosedur pelayanan pada setiap jenis layanan dalam aplikasi JULAK.id.
 - Menampilkan informasi stok/ketersediaan benih pada layanan perbenihan.
 - Menyajikan informasi layanan dalam format ringkas dan mudah dipahami.
2. Merinci Biaya/Tarif dan Memperkuat Dasar Hukum Layanan
 - Menyusun rincian harga bibit/benih yang diperjualbelikan pada layanan perbenihan.
 - Menambahkan peraturan/dasar hukum terkait tarif layanan laboratorium dan benih sumber ke dalam Standar Pelayanan Publik.
3. Penguatan Mekanisme Penanganan Pengaduan
 - Menambahkan jangka waktu pada setiap tahapan mekanisme pengaduan, mulai dari kelengkapan berkas hingga penyelesaian.
 - Menjelaskan bentuk kompensasi yang diberikan kepada masyarakat apabila terdapat kekurangan/ketidaksesuaian layanan yang bersumber dari pihak BRMP.
4. Integrasi dan Modernisasi Kanal Layanan Digital
 - Memastikan aplikasi JULAK.id terintegrasi dan tampil pada website resmi BBPMP Kalimantan Selatan.

- Menambahkan informasi cuaca dan iklim (termasuk El Niño dan La Niña) serta materi edukatif pembacaan peta cuaca pada layanan, khususnya layanan perpustakaan.
5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Layanan
- Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi SPP.
 - Mengumumkan capaian layanan, waktu penyelesaian, serta tindak lanjut pengaduan secara berkala.
 - Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara rutin sebagai dasar evaluasi.
6. Penguatan Kemitraan dan Jejaring Kolaboratif
- Membangun kerja sama strategis dengan dinas pertanian, perguruan tinggi, kelompok tani, industri pertanian, dan lembaga riset.
 - Mengoptimalkan peran mitra dalam pendampingan teknologi dan diseminasi layanan publik.

BAB IV. PENUTUP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan telah memberikan ruang dialog konstruktif antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan. Melalui forum ini, berbagai persoalan mendasar terkait kualitas, aksesibilitas, pemahaman, serta konsistensi pelayanan publik berhasil teridentifikasi secara jelas. Masukan yang diberikan oleh peserta forum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mitra strategis terhadap layanan pertanian yang lebih modern, cepat, efisien, serta responsif terhadap tantangan di lapangan.

Dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Cepat, Mudah, dan Profesional”, maka Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan berkomitmen untuk:

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP, termasuk melengkapi informasi layanan pada aplikasi JULAK.id dan menyesuaikan rancangan Standar Pelayanan Publik (SPP).
2. Menjadikan hasil FKP sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Menyusun rencana aksi yang lebih terarah dan implementatif, mencakup penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP), percepatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sosialisasi informasi, penguatan pengelolaan pengaduan, serta perluasan jejaring kolaborasi dalam penerapan teknologi modernisasi pertanian.

Akhirnya, BRMP Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta FKP yang telah memberikan kontribusi pikiran dan rekomendasi konstruktif. Semoga kolaborasi ini terus terjaga dan menjadi fondasi kuat dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Melalui kerja bersama, modernisasi pertanian yang adaptif dan berkelanjutan dapat terwujud demi mendukung pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan dan nasional.

LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
JALAN PANGLI MA BATUR BARAT NO. 4, MENTAOS, BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772346, FAKSIMILI (0511) 4781810
WEBSITE: www.kalsel.brmp.pertanian.go.id

BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan yang dilaksanakan secara luring bertempat di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1	Persyaratan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tidak ada masukan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap jangka waktu pelayanan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
4	Biaya/tarif	Sebagian masih belum ada rincian biaya tarif untuk layanan perbenihan komoditas tertentu	Merinci harga bibit/benih yang diperjualbelikan
5	Produk Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Alur mekanisme pengaduan belum mencantumkan jangka waktu pada setiap tahapan (kelengkapan berkas dan penyelesaian) proses penanganan pengaduan	Menambahkan jangka waktu pada tahapan mekanisme pengaduan
7	Dasar Hukum	Perlu menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan	Menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan laboratorium dan benih sumber
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
9	Kompetensi Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
10	Pengawasan Internal	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
11	Jumlah Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
12	Jaminan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan standar pelayanan yang mengikutsertakan masyarakat serta pihak terkait dalam setiap proses sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 4 Agustus 2026

No	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
A	Syahrudin	Pengguna Layanan: SMKPP Negeri Paringin	
B	Wahyu W	Stakeholder: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala	
C	Hasrudin	Organisasi Masyarakat Sipil: KT. Tabah Berdayung, Tambak Sarinah, Kurau, Tanah Laut	

Plt. Kepala Badan Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan,



Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc
NIP 197701072002122002

LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
JALAN PANGlima BATUR BARAT NO. 4, MENTAOS, BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772346, FAKSIMILI (0511) 4781810
WEBSITE: www.kalsel.brmp.pertanian.go.id

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Forum Konsultasi Publik
Tanggal : 4 Agustus 2026
Tempat : Ruang Pertemuan BRMP Kalimantan Selatan

No	Nama	Satuan Kerja/Kelompok	Tanda Tangan
1	Ir. H. Syamsir Rahman	Kepala DPKP Prov Kaltel	1
2	M. Syarif	BRMP Kalsel	2
3	Akti. Halim Rahmi	Dinas Pertanian Hesi	3
4	Niken	BRMP Kaltel	4
5	Alma Maulida	BRMP Kaltel	5
6	Yosef Luky DP	BMKG	6
7	Rizka Novita	BMKG	7
8	SYAHMUDIN	SIMLEPPN PAKUMEN	8
9	Soleh Wahyudi	KEPP Bmway	9
10	Reni Yunita Ariani	Embudaman RI Kalsel	10
11	Ismail P	BPLIP Baman	11
12	Abdul Sabur	APLIP Hkary	12
13	Eddy Rahmadi	DKPP Kotabaru	13
14	EKO HARIPANTO	DISBUNNAR BATOLAN	14
15	Rujasnor	Outbatsman Kalsel	15
16	Fachrudin Izz	Disnarcosman Tera	16
17	Shinta Anggreany		17
18	M. Munay	Disnarkuswan Tera	18
19	Muhammad Shihyad	Labikur Lab. Tegeris	19
20	Prangeli P	PZAMB BPSB	20
21	Ryandito	R-V KTB	21
22	Ab. Riyani	Kj Prov. Kaltel	22
23	Ridwanura	KI Prov. Kaltel	23
24	Ar. Syarifuddin	Disnarp HSS	24
25	NIEL HATIEM	JPT Peng Al Sutan	25
26	Wahyu Ar Septu	DisPPWS	26

No	Nama	Satuan Kerja/Kelompok	Tanda Tangan
27	Rahman i	Dep 3 Tog	27
28	Hj. Rusdiana	DIKPP KTB	28
29	Mujia	Dep 3 Tog	29
30	Bismilawati	Dep 3 Tog	30
31	Mujibur	BRUP KTB	31
32	Xucha Kp	"	32
33	Wahyu W	Distribusi Bata	33
34	Robby Andra	DEPP Tanah	34
35	Kiki. Satrio	Dep 3 Tog	35
36	M. Ridhony	PT. Pupuk Indonesia	36
37	Gesang Santoso	"	37
38	M. Triandoro	Dispersi Tapi	38
39	Benny Perdana	"	39
40	HASRUDINI	Penangkar Batin	40
41	Abdul Basit	Petani Penangkar	41
42	M. FATHUR	Distribusi	42
43	MUFFIZAR	Distribusi	43
44	Zohranabi	SMK - PPM Bgb	44
45	Fuqi Maulana A.	Uniska Mab Banjarmasin	45
46	KHAIRI Rafeli	SMKpp. Negeri Parangin	46
47	Demi Suban Andri	BPSTPH Kalsel	47
48	Meity Norbah	BPSTPH STAFF	48
49	Arim Laasonawati	BPSTPH STAFF	49
50	Fern. N	BRUP Kalsel	50

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4, MENTAOS, BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772346, FAKSIMILI (0511) 4781810
WEBSITE: www.kalsel.brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-425 /TU.020/H.12.26/07/2026
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik
(FKP) BRMP Kalimantan Selatan

30 Juli 2026

Yang Terhormat,
Bapak/ Ibu (terlampir)
Di Tempat

Kerjasama, koordinasi serta kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 4 Agustus 2026
Jam : 08.30 WITA sampai selesai
Tempat : Gedung Pertemuan BRMP Kalimantan Selatan
Jl. Panglima Batur Barat No. 4, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Balai Besar,

Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc
NIP 197701072002122002

Tembusan Kepada Yth:
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.

Lampiran I : Daftar Undangan
 Nomor : B-4257TU.020/H.12.26/07/2026
 Tanggal : 30 Juli 2026

Kepada Yang Terhormat:

No	Lembaga/Instansi/Kelompok	Jumlah Peserta
A	Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga	
1	Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan	1
2	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan	1
3	Kepala BBPP Binuang	1
4	Kepala BRMP Rawa	1
5	Kepala Balai Verteriner Banjarbaru	1
6	Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru	1
7	Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	1
8	Kepala Balai Teknik Rawa	1
9	Kepala BPTU-HPT Pelaihari	1
10	Kepala BSPJI Banjarbaru	1
11	Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Banjarbaru	1
B	Dinas/Lembaga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	
1	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	1
2	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	1
3	Kepala Stasiun Klimatologi Klas I Banjarbaru	1
C	Unit Pelaksana Teknis Daerah	
1	Kepala BPSB TPH Provinsi Kalimantan Selatan	1
2	Kepala BTPH Provinsi Kalimantan Selatan	1
3	Kepala Balai Benih TPH Provinsi Kalimantan Selatan	1
4	Kepala Balai Alsintan Provinsi Kalimantan Selatan	1
5	Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Selatan	1
D	Dinas/Lembaga Tingkat Kabupaten/Kota	
1	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar	1
2	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	1
3	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	1
4	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala	1
5	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	1
6	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru	1
7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	1
8	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu	1
9	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kotabaru	2
10	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin	1
11	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1
12	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1

No	Lembaga/Instansi/Kelompok	Jumlah Peserta
13	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara	1
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan	1
15	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong	1
E Lembaga Pendidikan		
1	Dekan Fakultas Pertanian UNISKA	1
2	Kepala SMKPP Negeri Paringin	1
F Swasta		
1	PT. Sucofindo	1
2	PT. Pupuk Indonesia	1
G Petani Penangkar Benih Padi		
1	Abdul Basit	1
2	Hasrudin	1
Jumlah		40

Lampiran II : Jadwal Kegiatan
 Nomor : B-4257TU.020/H.12.26/07/2026
 Tanggal : 30 Juli 2026

**Jadwal Tentatif Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)
 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
 Banjarbaru, 4 Agustus 2026**

Waktu (Wita)	Acara	Keterangan
08.30 - 09.00	Registrasi peserta	Panitia
09.00 - 09.20	1. Pembukaan 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3. Pembacaan doa	MC
09.20 - 09.45	Sambutan-sambutan: 1. Kepala BRMP Kalimantan Selatan 2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	1. Kepala BRMP Kalsel 2. Kepala DPKP Prov. Kalsel
09.45 - 09.50	Sesi foto bersama	Panitia dan peserta
09.50 - 10.00	1. Penayangan Profil BRMP Kalimantan Selatan 2. Launching Aplikasi Julak V.2	Tim Medsos BRMP Kalsel
10.00 - 10.15	Paparan layanan BRMP Kalimantan Selatan	Kabag Tata Usaha
10.15 - 10.45	Peran PPID dan Komisi Informasi dalam Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel	Komisi Informasi Prov. Kalsel
10.45 - 11.15	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penanganan Aduan atau Keluhan Masyarakat	Ombudsman RI Perwakilan Kalsel
11.15 - 11.45	Diskusi	Moderator
11.45 - 11.55	Penyampaian Maklumat Pelayanan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pelayanan BRMP Kalimantan Selatan	Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
11.55 - 12.00	Penyerahan "Stakeholder Award"	MC
12.00 - selesai	Penutupan	MC

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN



LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA

Berikut disajikan rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025, beserta realisasinya sampai dengan pelaksanaan FKP Tahun 2026.

No	Rekomendasi/Rencana Aksi FKP 2025	Tindak Lanjut/Realisasi s.d. 2026	Status	Keterangan
1	Penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP): menyusun ulang SPP berdasarkan masukan peserta FKP, menyediakan dokumen SPP yang ringkas dan mudah dipahami, serta menampilkannya pada media digital dan ruang layanan.	Telah dilaksanakan penyusunan/penyempurnaan rancangan SPP yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan (14 komponen) pada FKP 2026. Informasi layanan juga ditampilkan melalui aplikasi JULAK.id.	Terealisasi	—
2	Integrasi dan Digitalisasi Sistem Layanan: mengembangkan sistem layanan berbasis web untuk pendaftaran, pengajuan, dan pelacakan layanan; meningkatkan fitur informasi publik digital; serta membangun kanal pengaduan online yang terintegrasi.	Telah diluncurkan (launching) aplikasi JULAK.id sebagai inovasi digitalisasi sarana pelayanan publik yang terintegrasi dengan website resmi BBPMP Kalimantan Selatan. Kelengkapan informasi (persyaratan, jangka waktu, biaya/tarif, alur layanan, stok benih, serta informasi cuaca/iklim) masih terus dilengkapi.	Terealisasi	Penyempurnaan konten aplikasi masih berjalan
3	Penguatan Kapasitas SDM Layanan Publik: pelatihan pelayanan prima, etika pelayanan, dan literasi digital; penetapan standar kompetensi petugas layanan; serta penyusunan pedoman layanan berbasis modernisasi.	Telah dilaksanakan penguatan kapasitas melalui penyampaian materi pada FKP 2026 dengan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, mengenai pengawasan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, serta peran PPID dan keterbukaan informasi publik.	Terealisasi	—
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan: penataan ruang layanan publik yang ramah pengguna, penambahan	Telah dilaksanakan secara bertahap. Namun demikian, laboratorium belum dapat beroperasi karena terkendala belum siapnya sumber daya	Dalam Proses	Laboratorium belum beroperasi; sertifikasi ISO belum dapat

No	Rekomendasi/Rencana Aksi FKP 2025	Tindak Lanjut/Realisasi s.d. 2026	Status	Keterangan
	fasilitas pendukung agroedukasi, magang, dan laboratorium, serta pengembangan fasilitas layanan berbasis teknologi digital.	manusia (SDM) yang tersedia, sehingga proses pendaftaran sertifikasi ISO laboratorium juga belum dapat dilaksanakan.		didaftarkan karena kesiapan SDM
5	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Layanan: penguatan monitoring dan evaluasi SPP, pengumuman capaian layanan dan tindak lanjut pengaduan secara berkala, serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin.	Telah dilaksanakan melalui pelibatan Ombudsman dan Komisi Informasi dalam pengawasan pelayanan, penyampaian Maklumat Pelayanan Publik, serta penguatan mekanisme pengaduan. Pelaksanaan SKM secara rutin dan pengumuman capaian layanan berkala terus dilanjutkan.	Dalam Proses	—
6	Penguatan Kemitraan dan Jejaring Kolaboratif: membangun kerja sama strategis dengan dinas pertanian, perguruan tinggi, kelompok tani, industri pertanian, dan lembaga riset, serta mengoptimalkan peran mitra dalam pendampingan teknologi dan diseminasi layanan.	Telah dilaksanakan melalui penandatanganan berita acara kesepakatan dengan pemangku kepentingan (antara lain SMK-PP Negeri Banjarbaru, Kelompok Tani dari Kurau Tanah Laut, dan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar) serta pelibatan mitra lintas sektor pada pelaksanaan FKP 2026.	Terealisasi	—